**TINDAKAN PERUSAHAAN *LEASING* TERHADAP KONSUMEN YANG
WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus di PT. *BCA Finance* Kota Malang)**

Alif Dharmawan,¹ H. Suratman,² Benny K. Heriawan³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341)551932
E-mail: cungcarong19@gmail.com

ABSTRACT

The objective of this research are to identify the factors that cause consumer default and whether the leasing party involves the police apparatus in withdrawing the motor vehicle, the problem formulation of this final project is the factors that cause consumer default at PT. BCA Finance Malang City and the settlement of default by the creditor involving the police apparatus in withdrawing the motor vehicle. The method used in this research is empirical juridical. The types of data used are primary and secondary. Data collection techniques are primary and secondary. The conclusion of this problem is the factors that cause consumer defaults at PT BCA Finance Malang City in the leasing agreement, there is a failure in the business that requires the customer to finally have no income and that has an impact on ongoing credit payments, this causes the customer to finally not be able to pay credit.

Keywords: *Leasing company, Consumer, Default.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab konsumen wanprestasi dan apakah pihak *leasing* melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor tersebut, rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah faktor penyebab konsumen wanprestasi di PT. *BCA Finance* Kota Malang dan penyelesaian wanprestasi pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu primer dan sekunder. Kesimpulan dari permasalahan ini faktor penyebab konsumen wanprestasi di PT. *BCA Finance* Kota Malang dalam perjanjian *leasing*, terdapat kegagalan pada usaha yang mengharuskan nasabah akhirnya tidak memiliki pemasukan dan itu berdampak pada pembayaran kredit yang sedang berlangsung hal ini menyebabkan akhirnya nasabah tidak bisa membayar kredit.

Kata Kunci: *Perusahaan leasing, Konsumen, Wanprestasi.*

PENDAHULUAN

Kendaraan saat ini merupakan mobilitas yang sangatlah penting bagi masyarakat, baik itu mobil atau motor. Adanya kendaraan bermotor mobilitas manusia menjadi sangat mudah, maka dari itu kehidupan manusia sangatlah bergantung pada kendaraan bermotor, ditambah

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dengan pembelian kendaraan bermotor saat ini sangatlah mudah. Saat ini pembelian kendaraan bermotor hanya dengan menunjukkan bukti identitas, bukti kepemilikan, bukti penghasilan dan bukti kerja usaha. Karena mudah maka banyak masyarakat banyak membeli kendaraan bermotor. Masyarakat membeli kendaraan bermotor digunakan sebagai transportasi usahanya. Lambat laun tentunya usaha seseorang membutuhkan ekspansi agar lebih meluas. Ekspansi dalam melakukan usaha tentunya memiliki dua cara agar mendapatkan transportasi sebagai mobilitas ekspansi pada usaha seseorang. Yaitu dengan cara membeli, baik itu dari dana sisa kas. Perusahaan dan hutang kepada bank maupun kreditur. Selain itu cara yang kedua dengan menyewa modal dari *leasing*. Transaksi *leasing* dimulai sejak tahun 1990 dan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Negara Amerika Serikat adalah negara yang mengalami pertumbuhan transaksi *leasing* sangat tinggi hingga 400% sejak 1990. Indonesia, pertumbuhan pada transaksi *leasing* juga sangat tinggi, akan tetapi tak setinggi Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, lambat laun kebutuhan manusia sangat meningkat bahkan bisa dikatakan sebagai kebutuhan konsumtif yang diartikan sebagai gaya hidup seseorang yang selalu atau gemar membelanjakan uangnya tanpa adanya pertimbangan. Budaya konsumtif ini banyak masyarakat yang membeli barang dengan sistem *leasing*. Alasan mereka menggunakan sistem *leasing* karena untuk mempermudah keuangan mereka.⁴ *Leasing* juga telah memasuki bangsa Eropa pada tahun 1850. Ini juga menjadi lahan bisnis, perdagangan, produksi dikalangan para pengusaha pada saat itu dengan menggunakan semua jenis usaha saat menjalankan usahanya pada perusahaan. Setelah itu lambat laun *leasing* memasuki Indonesia, dan dilihat oleh pengusaha dan dimanfaatkan sebagai modal pemenuhan untuk usahanya. Dalam kata lain *leasing* yaitu sebagai dasarnya kegiatan penyewaan, dan telah digunakan untuk modal sebagai usahanya agar terus berkembang.⁵

Pengertian dari pembelian sistem *Leasing* suatu pembelian barang yang di mana pembelian barangnya dibayar dengan cara berangsur-angsur atau dalam kata lain kredit. Pembayaran berangsur ini harus disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual dan sesuai dengan tahapan pembayaran. Alasan transaksi dalam *leasing* ini dikarenakan kurangnya dana yang dimiliki konsumen untuk membeli barang tersebut, sehingga konsumen menghubungi pihak *leasing* dengan tujuan pihak *leasing* membiayai barang yang diinginkan

⁴ Sri Warjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 39

⁵ Zaeni Asyhadie, (2005), *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, h. 105

konsumen tersebut. Awal mula adanya *leasing* di Indonesia secara formal yaitu diperkenalkan pada tahun 1974, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor KEP 122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/Sk/1974 dan Nomor 30/kpb/I/1974 Tentang Perizinan Usaha *Leasing*. Adapun pengertian *leasing* adalah sebagai berikut. Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.⁶ Jual beli secara kredit diperbolehkan, karena jika tidak diperbolehkan konsumen tidak akan bisa meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Sedangkan barang yang dibeli secara kredit tersebut banyak berperan bagi konsumen itu untuk melakukan peningkatan taraf pada hidupnya, seperti kredit kendaraan bermotor guna keperluan lainnya, kredit rumah. Pembelian kendaraan bermotor di era modernisasi saat ini memiliki perkembangan yang sangat tinggi, penjualan kendaraan bermotor secara kredit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *leasing* agar menarik perhatian konsumen. Harus ada hal yang diperhatikan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor secara kredit. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor, kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yang di beli dengan cara kredit apakah sepenuhnya milik hak konsumen atau masih kepemilikan perusahaan atau dealer yang mengurus kredit kendaraan bermotor tersebut.

Pada *leasing* sering sengketa atau nama lain wanprestasi antara debitur dan kreditur. Hal ini yang harusnya dilakukan debitur yang memiliki hak dan kewajiban saat melakukan prestasi saat melakukan kontrak oleh *leasing*.⁷ Perjanjian dalam *leasing* antara *lessee* dan *lessor* perjanjiannya standard dalam bentuk tertulis. Isinya telah ditentukan oleh semua jenis dari pihak *leasing* sendiri serta adanya hubungan hukum (kewajiban dan hak) yang menimbulkan timbal balik *lessee* dan *lessor*. Pemerolehan pembayaran adalah kewajiban dan hak bagi *lessor* atas imbalan serta jasa dan harus memberikan modal barang ke *lessee*. Sementara itu kewajiban dari *lessee* yaitu memperoleh hasil kegunaan dari modal barang serta membayar semua sewa berkala. Kewajiban dan hak saat tidak terpenuhi para semua pihak maka bisa dikatakan wanprestasi. Berakhirnya perjanjian antara *lessee* dan *lessor*

⁶ Suhrawardi k. Lubis dan Farid Wajdi, (2001), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, h.102 – 103.

⁷ Ni Luh Ayu Regita Cahyani, I Nyoman Putu Budiarta, (2021), Hukum Perlindungan Bagi *Leasing* Terhadap Debitur Wanprestasi, *Jurnal Prefensi Hukum*, Volume 2, Nomor 2.

sudah dilaksanakan dengan perjanjian.⁸ Menurut M. Yahya Harahap, “perjanjian yaitu hubungan dalam ruang lingkup hukum dari sisi kekayaan yang dilakukan dua orang bahkan bisa lebih, agar mendapatkan kata sepakat atau prestasi”⁹. Dari uraian di atas menurut beberapa pakar hukum tentang kontrak ataupun perjanjian, bisa disimpulkan perjanjian adalah suatu peristiwa yang isinya janji antara kedua belah pihak yang telah disetujui. Kewajiban serta hak-hak yang tertera oleh kedua belah pihak. Adapun sasaran dari perjanjian yaitu prestasi.¹⁰ Menganut pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, prestasi bisa memberi sesuatu, tidak berbuat sesuatu, berbuat sesuatu dalam suatu hal Prestasi dalam menjalankan sesuatu yang tidak memberikan, adalah menterbitkan buku oleh penerbit buku IKAPI Bandung. Sementara pengertian tidak membuatnya sesuatu, pihak penerbit buku tidak mau menerbitkan naskah buku yang telah dibuat. Sementara itu agar perjanjian mencapai kata sah, objeknya harus memiliki syarat yang harus terpenuhi, harus objek tertentu dan bisa ditentukan, mengikuti aturan undang-undang yang telah berlaku, dan tak boleh bertentangan dengan tata susila dan ketertiban.¹¹

Saat melaksanakan kontrak ataupun perjanjian, semua subjek harus memiliki kondisi yang memiliki sifat tertentu supaya mengikat pihak yang telah membuat. Apabila subjek hukum “orang” (*natuurlijke persoon*) orang itu harus dewasa. Apabila subjek “badan hukum” (*recht persoon*) syarat formalnya harus terpenuhi. Subjek hukum harus memiliki kewajiban dan hak yang sama saat melakukan peristiwa perjanjian atau kontrak. Maka dari itu, pada hukum perjanjian, individu bisa menjadi subjek hukum. Saat uang muka belum tersedia dan barang tersebut belum juga diberikan kepada konsumen, di situ bisa dikatakan bahwa pembeli belum terikat dengan perjanjian tersebut.¹² Tak jarang pula konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang dilakukan di awal tersebut, yaitu salah satunya dengan terdapatnya biaya penunggakan pembayaran, atau tak jarang juga konsumen melakukan pembayaran secara ganda dan terdapatnya penarikan pada barang berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan. Apabila terdapat permasalahan, biasanya yang diambil atau ditarik yaitu obyek (kendaraan bermotor). Langkah yang diambil untuk

⁸ Aprilianti, (2011), Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 3.

⁹ M. Yahya Harahap, (1982), *Segi-segi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Alumni, h. 3.

¹⁰ Periksa Pasal 1234 KUHPerdata Indonesia.

¹¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, (1987), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, h. 391.

¹² Ade Arthesa, Edia Hendiman, (2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, h. 252-253.

meminimalisir risiko, sering kali pihak *leasing* melakukan penarikan obyek barang jual beli yaitu kendaraan bermotor. Dihal itu maka risiko dan kerugian yang diambil pembeli lebih banyak. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sangatlah penting peradilan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan perjanjian tidak sesuai dengan kesepakatan atau wanprestasi. Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah, apa yang menjadi faktor penyebab konsumen wanprestasi dalam perjanjian leasing, apakah dalam penyelesaian wanprestasi, pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor tersebut. Istilah metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya jalan, akan tetapi menurut kebiasaan metode yang telah memiliki rumus dengan kemungkinan satu tipe yang telah digunakan dalam penelitian.¹³ Metode penelitian adalah cara melakukan suatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk tercapainya satu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai Menyusun laporan.¹⁴ Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, di PT. *BCA Finance* Kota Malang. Data yang digunakan adalah data primer dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Konsumen Wanprestasi di PT. *BCA Finance* Kota Malang

Pada perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT. *BCA Finance* dengan nasabah sangat besar manfaatnya bagi kedua pihak. Pada prakteknya di lapangan banyak sekali perjanjian kredit yang tak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibentuk atau bisa dikatakan sebagai konsumenyang wanprestasi. Wanprestasi sangat marak terjadi dan sering kita temui, wanprestasi ini sangat berdampak besar karena mengakibatkan rugi yang sangat besar bagi salah satu pihak yaitu kreditur. Apabila sudah ada wanprestasi maka salah satu pihak sudah melakukan tindakan yang diluar kesepakatan awal. Berdasarkan informasi yang sudah diperoleh dari Bapak Toni Hali selaku Kepala Cabang PT. *BCA Finance* Kota Malang, di PT. *BCA Finance* Kota Malang ada kolektibilitas yang sudah diterapkan yaitu sebagai berikut:

a. Kolektibilitas 1 (Macet)

Pada Kolektibilitas ini kredit macet adalah suatu tindakan yang dilakukan nasabah yaitu keterlambatan membayar angsuran atau membayar bunga selama 3 bulan berturut. Saat

¹³ Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia pers, h. 5.

¹⁴ Abu Achmad, Cholid Narbuko, (2003), *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari, h 1.

ada kredit macet di lapangan tidak mungkin pihak PT. BCA Finance membiarkan atau tidak mengurus hal-hal seperti itu namun cara pihak PT. BCA Finance mengatasi hal itu dengan memberikan surat peringatan, akan tetapi dari pihak nasabah yang tidak memiliki i'tikad yang baik. Saat pihak nasabah macet dalam menyelesaikan pembayaran maka pihak nasabah dianggap sudah wanprestasi, yaitu nasabah terlambat membayar kewajiban beserta bunganya yang telah disepakati oleh pihak nasabah pada awal perjanjian. Hal ini sangat menyebabkan rugi bagi pihak kreditur, macetnya kredit ini adalah tindakan yang membuat rugi pihak PT. BCA Finance dan hal seperti ini tidak boleh terus menerus karena akan berdampak bagi PT. BCA Finance pada masa kelangsungan usaha dan tidak adanya pemasukan dari kredit hasil bunga yang dimana hasil ini biasanya diperoleh dari nasabah yang membayar.

b. Kolektibilitas 2 (Bermasalah)

Kolektibilitas pada kredit bermasalah sebuah tindakan yang nasabah lakukan yaitu terlambat pada pembayaran bunga atau angsuran 2 bulan. Pihak BCA *Finance* bisa juga menambah kenaikan kredit bermasalah ke 3 bulan dan masuknya ke dalam kredit macet apabila pihak BCA berkeyakinan bahwa nasabah tidak bisa bayar.

c. Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar)

Kolektibilitas pada kredit kurang lancar pihak nasabah terlambat membayar kewajiban selama 1 bulan. Dalam kasus seperti ini pihak BCA masih memberikan surat peringatan yang pertama. Apabila kredit masih kurang lancar pihak BCA harus melakukan tindakan pencegahan yaitu dengan cara menggali dan mencari sebab kenapa nasabah mengalami kredit yang kurang lancar.

d. Kolektibilitas 4 (Lancar)

Kolektibilitas pada kredit lancar adalah kredit keadaan yang paling baik karena tidak pernah mengalami masalah. Dalam kredit lancar ini pihak nasabah tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran. Apabila nasabah tidak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran maka nasabah akan dipermudah saat melakukan pinjaman lagi.

Akibat dari debitur yang membayar terlambat akhirnya menimbulkan kerugian pada pihak kreditur. Terdapat empat implikasi hukum atau juga bisa dikatakan sebagai sanksi wanprestasi:

- 1) Debitur harus membayar banyaknya ganti rugi kepada pihak kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- 2) Jika ada pembatalan kontrak harus terkait oleh ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata).

- 3) Jika ada wanprestasi resiko pengalihan harus dilakukan secara segera oleh debitur (Pasal 1237 KUH Perdata).
- 4) Membayar biaya perkara pada sidang harus di hadapan hakim langsung (Pasal 181 ayat 1 HIR)

Kontrak pada bilateral memberikan suatu hak pada pihak yang lain untuk mengakhiri kontraknya karena kelalaian atau kegagalan pada salah satu pihak. Dalam hal seperti ini, pihak wasit harus minta pembatalan. Pada persyaratan ini harus ada unsur yang terpenuhi jika semua kontrak memuat semua klausul yang sifatnya pengecualian. Jika semua syarat tidak terpenuhi pada kontrak, hakim mempunyai wewenang untuk memberikan tenggang waktu pada terdakwa dan tidak boleh lebih satu bulan, ini sangat bergantung pada keadaan, permintaan atas terdakwa. (Pasal 1266 KUH Perdata). Menurut Pasal 1267 KUHPerdata, jika pihak debitur melakukan wanprestasi, hak bisa dituntut oleh pihak kreditur. Hak-hak nya adalah: Pelaksanaan kontrak jika terkait dengan kerusakan, Pemenuhan kontrak, Kontrak yang diputus, Memberikan kompensasi saja, Kontrak diputus dengan memberi kompensasi. Apabila semua Persyaratan telah disetujui, Pihak dari lessor akan memberitahukan kepada supplier untuk menegosiasi barang dan memberitahukan pihak asuransi agar menanggung risiko pembayaran yang macet oleh lessee. Tetapi, pada praktiknya bisa sebelum nasabah mengajukan permohonan kepada perusahaan leasing, pihak lessee sebelumnya melakukan negosiasi kepada supplier, Setelah itu mencari perusahaan leasing yang kemudian dijadikan lessornya. Perjanjian akan menjadi syah ketika persyaratannya telah terpenuhi dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut: terdapat kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengikat. Arti dari sepakat yaitu telah adanya perjanjian antara kedua pihak. Kesepakatan ini memiliki pengertian yaitu antara kedua belah pihak saling menyatakan keinginan masing-masing untuk mengakhiri perjanjian tersebut dengan pernyataan dari salah satu pihak cocok dengan keinginan pihak lainnya, Cakap dalam membuat perjanjian Arti dari cakap, yaitu kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian telah dewasa dan sehat, dan tidak. Berhubungan dengan perwalian. Bila mana yang melakukan perjanjian itu adalah lembaga hukum, maka perlu orang yang memiliki kewenangan, suatu hal tertentu hal tertentu yaitu objek perjanjian tersebut, membahas tentang apa yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban yang terdapat pada perjanjian tersebut harus jelas isinya. Pada pasal 1333 KUHPerdata menerangkan bahwa suatu perjanjian harus memiliki sebagai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya, bukan menjadi masalah ketika jumlah barang tidak sesuai, asal jumlah

itu nantinya bisa dihitung dan ditentukan. Suatu sebab yang halal Sebab adalah awal mula yang membuat perjanjian itu terealisasi, Suatu sebab bisa dikatakan halal yaitu obyek yang dibuat perjanjian bukan obyek yang bersifat terlarang akan tetapi telah diperbolehkan oleh hukum. Sebab yang dikatakan tidak halal yaitu apabila terdapat perbuatan yang melanggar hukum, tidak sesuai kepentingan umum. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan perjanjian antara pihak debitur dan pihak leasing harus memiliki ketentuan atau syarat perjanjian yang sudah dijelaskan. Pihak Yang Ikut Terlibat Dalam *Leasing* Pada pemberian fasilitas leasing terdapat beberapa pihak, setiap pihak mempunyai kewajibannya dan hak nya masing-masing. Dalam melakukan kegiatannya masing-masing pihak tersebut akan saling bekerja sama dan keterkaitan antar satu sama lain sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat secara bersama. Pada kegiatan sewa guna leasing dilaksanakan dengan menyediakan berupa barang modal oleh lessor yang ditujukan kepada lessee agar bisa menjalankan usahanya tersebut. Pada transaksi sewa guna usaha terdapat 3 (tiga) pihak yang berperan, antara lain supplier, lessee, lessor. Supplier berperan sebagai pihak yang menjual atau menyediakan barang modal. Akan tetapi, dikarenakan pembiayaan tersebut diperlukan dana yang sangat besar serta tak jarang pula terdapat resiko, maka terkadang dalam transaksi sewa guna usaha juga harus mendatangkan pihak bank, dan perusahaan asuransi. Pihak Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Lessor*) perusahaan sewa guna usaha lessor yaitu pihak yang mengatasi atau memberikan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan untuk barang modal. Perusahaan sewa guna usaha ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang perusahaan pembiayaan yang sifatnya multi finance atau perusahaan yang bergerak pada bidang sewa guna usaha. Dalam membantu konsumen untuk pengadaan barang modal, sewa guna usaha terlebih dahulu menghubungi penjual (pihak supplier) dan barang tersebut di bayar lunas oleh pihak sewa guna usaha. Imbalan yang di dapat dari pembiayaan ini, lessor pada financial lease tujuannya yaitu mengambil lagi barang yang telah keluar untuk pengadaan pada barang modal bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada operating lease, lessor mempunyai tujuan yaitu mendapatkan imbalan atas penyediaan barang modal.

Pihak Penyewa Guna Usaha (*Lessee*) Penyewa guna usaha (*Lessee*) yaitu pihak yang mendapatkan pembiayaan dari lessor berupa barang modal. Lessee pada financial lease memiliki hak atas barang modal saat kontrak berakhir dengan berdasarkan menghitung nilai sisa (*residual value*). Pada operating lease, saat kontrak telah berakhir barang modal itu harus dikembalikan kepada lessor. Pada operating lease ini, pihak lessee bisa melengkapi kebutuhan barang modal dan operator tenaga selain itu bebas dari risiko kerusakan, biaya,

perawatan barang modal. Penjual (Supplier) Penjual (supplier) yaitu perusahaan yang menjual barang modal yang diinginkan oleh lessee. Barang modal tersebut akan dibeli serta telah dibayar secara lunas oleh pihak lessor selaku pihak pembiayaan. Pada operating lease, supplier menjual barangnya secara langsung ke lessor sesuai sistem pembayaran dan kesepakatan yang telah di bentuk apa pembayaran itu dilakukan secara tunai atau berkala. Bank maupun kreditor memiliki peranan yang sangat penting saat transaksi sewa guna usaha, bank tidak terlibat pada perjanjian secara langsung, akan tetapi bank memiliki peran sebagai pemegang pada penyediaan dana ke lessor, terlebih pada mekanisme leverage lease. Pada mekanisme leverage lease, bank memberikan sumber dana secara kredit kepada lessor untuk pembiayaan. Selain itu bank juga memberikan kredit kepada pihak supplier dalam penyediaan barang modal

B. Penyelesaian Wanprestasi Pihak Keditur Melibatkan Aparat Kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor

Penyelesaian sengketa adalah cara menyelesaikan permasalahan oleh salah satu bagian pihak yang telah mengalami banyak rugi. Menyelesaikan sebuah sengketa biasanya dengan membawa ke jalur hukum yaitu ke jalur pengadilan (*Litigasi*) bisa dengan menyelesaikan luar pengadilan (*Non Litigasi*). Menyelesaikan kredit yang macet bisa dilakukan pada Lembaga Hukum bisa juga lewat Direktorat Pengadilan dalam mengatasi kasus Piutang. Hal ini bertujuan untuk menjual atau mengeksekusi barang jaminan. Permasalahan macetnya kredit bisa dilihat oleh pihak BCA dengan melihat terus perkembangan dari setoran yang dilakukan oleh pihak nasabah, sehingga bila nanti terjadi kredit macet pihak BCA bisa mengantisipasi dari awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT. BCA *Finance* Kota Malang, pihak *leasing* melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan atau menyelesaikan wanprestasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang marak terjadi di lapangan debt collector memakai cara kekerasan dalam menarik kendaraan tersebut.

Hal ini ditujukan agar kasus-kasus kekerasan yang dilakukan debt collector terhadap nasabah atau debitur dalam menarik kendaraan tidak terjadi lagi karena hal ini bisa sangat merugikan debitur Eksekusi jaminan adalah penyelesaian sengketa oleh pihak PT. BCA *Finance* Kota Malang, eksekusi akan terjadi apabila pihak nasabah tidak melaksanakan tanggung jawab setelah disepakatinya waktu adanya perjanjian. Sebelum melakukan eksekusi jaminan tahapan yang harus dilakukan oleh pihak BCA adalah:

a. Memberikan Surat Peringatan Pertama

Surat peringatan pertama ini diberikan kepada nasabah apabila nasabah tidak kunjung melakukan tanggung jawabnya guna membayar tagihan. Hal ini bertujuan untuk memberi peringatan kepada pihak nasabah agar segeramembayar semua hutang-hutangnya. Ini bertujuan untuk agar nasabah di kemudian hari tidak seperti ini lagi. Pemberian ini memiliki waktu jika pihak BCA sudah mengeluarkan peringatan pertama dan 7 hari nasabah tidak menanggapi surat peringatan tersebut maka akan diberikan lagi surat peringatan yang ke dua, akan tetapi jika nasabah menyelesaikan dan menanggapi surat peringatan yang pertama, maka surat ini sudah bisa dinyatakan gugur atau terselesaikan.

b. Memberikan Surat Peringatan Kedua

Surat peringatan yang ke dua ini diberikan apabila pihak nasabah tidak menanggapi surat peringatan yang pertama. Sama dengan surat peringatan yang pertama, peringatan yang ke dua ini juga agar nasabah mau melunasi semua hutang-hutangnya sesuai waktu yang ditentukan. Sama halnya dengan surat peringatan yang pertama, surat peringatan yang ke dua ini juga memiliki tenggat waktu yang sudah ditentukan. Apabila pihak nasabah tak kunjung menanggapi surat peringatan yang ke dua, pihak BCA boleh memberikan peringatan yang ke tiga. Akan tetapi bila pihak nasabah menanggapi surat peringatan yang ini dan juga melunasi hutang-hutangnya, maka surat peringatan yang ke dua ini bisa dinyatakan gugur atau selesai.

c. Memberikan Surat Peringatan Ketiga

Apabila tidak ada tanggapan dari pihak nasabah sesudah dikeluarkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua, maka surat peringatan ke tiga ini yang akan dikeluarkan, ini bertujuan untuk memberikan sebuah peringatan yang sangat tegas ke pihak nasabah karena sudah dianggap melakukan cidera janji. Apabila dalam 7 hari pihak nasabah tak menanggapi ini, maka akan melakukan tindakan somasi ke nasabah. Bila nasabah menanggapi surat peringatan ketiga ini maka peringatan ketiga ini selesai. Isi dari Surat peringatan yang pertama sampai yang ketiga, secara garis besar isinya bersangkutan dengan hal ini:

- 1) Total semua hutang-hutang yang harus dibayarkan
- 2) Perintah yang tertera agar segera melunasi semua hutang-hutangnya
- 3) Batasan waktu nasabah melakukan kredit pembayaran
- 4) Pembayaran kredit mengenai jatuh tempo

Somasi adalah teguran ke calon tergugat, hal ini bertujuan memberi kata sepakat ke pihak calon tergugat agar bisa berbuat sesuatu atau berhenti ke perbuatan sesuai dengan tuntutan pihak yang menggugat. Hal ini sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa perkara sebelum diajukan ke jalur persidangan. Somasi dapat dilakukan dengan secara individu atau juga bisa secara kolektif baik dari kuasa hukum atau pihak yang dirugikan (calon penggugat). Dasar-dasar dari Somasi sudah tertera pada Pasal 1238 KUHPerdara Somasi yang dilakukan oleh PT. BCA Finance Kota Malang adalah dengan memanggil ke nasabah agar dilakukan peneguran terhadap apa yang telah dibuat oleh nasabah. PT. BCA Finance Kota Malang secara tegas menegur nasabah agar segera melunasi semua hutang-hutangnya. Dalam menyelesaikan somasi, pihak BCA akan memberitahukan akan dilakukan penyelesaian yang terakhir baik secara jaminan yang dieksekusi atau bisa penyerahan. Apabila saat pemanggilan somasi pihak nasabah tidak datang maka akan didatangi ke nasabah. Bila somasi tidak berhasil maka pihak BCA bisa melakukan tindak lanjut agar penyelesaian proses sengketa selesai.

a. Eksekusi Jaminan

Eksekusi jaminan adalah penyelesaian tindakan akhir yang akan dilakukan oleh PT. BCA Finance Kota Malang. Pelaksanaan eksekusi jaminan dilakukan apabila Surat peringatan yang pertama hingga yang ketiga gagal dan pelaksanaan somasi dari pihak PT. BCA Finance Kota Malang gagal, maka pihak PT. BCA Finance Kota Malang harus melakukan eksekusi jaminan guna jalan terakhir sebagai penyelesaian macet kredit yang ada di PT. BCA Finance Kota Malang. Pada hasil wawancara dengan Bapak Toni Hali, eksekusi dengan cara lelang sebagai jaminan hak tanggungan. Eksekusi yang memakai jaminan fidusia cara menyelesaikannya dengan melakukan penyerahan ke pihak BCA yang berarti jaminan fidusia tidak pernah melakukan lelang. Saat melaksanakan lelang dengan menggunakan jaminan hak tanggungan adalah alternatif terakhir pada penyelesaian macetnya kredit. Berdasarkan wawancara objek pelelangan harus dalam keadaan yang kosong. Contoh bila nasabah menggunakan rumah sebagai jaminan, rumah itu harus dikosongkan agar menghemat biaya yang dikeluarkan. Dalam melaksanakan pelelangan di PT. BCA Finance Kota Malang tak semuanya lancar, ada kalanya pihak nasabah tidak ingin jaminannya dilelang meski pihak BCA sudah memberitahukan bahwa akan dilelang. Apabila ini terjadi pihak BCA akan segera memikirkan solusinya dan solusinya adalah sepakat antar kedua pihak yang dimana pihak nasabah tetap membayar angsuran meski tidak lunas dan akhirnya kedudukan pihak nasabah yang semula berstatus kredit macet menjadi

kepercayaan yang bermasalah. Proses pelelangan pada saat eksekusi berlakunya hanya ke jaminan yang sifatnya hak tanggungan. Apabila pihak nasabah memakai jaminan fidusia, lelang tidak bisa dilaksanakan.

Biaya yang dibutuhkan pada saat lelang eksekusi sangat besar maka pihak BCA lebih memilih penyerahan objek karena biayanya lebih dikit. Pada proses penyerahan dilaksanakan dengan pihak BCA mengambil jaminan dari pihak nasabah dan jaminan tersebut nantinya akan dilakukan penjualan dan nantinya mengetahui harga barang jaminan. Apabila harga sudah bisa ditentukan maka bisa digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Bila harga barang cukup tinggi dan bisa untuk melunasi hutang maka nasabah sudah terbebas dari hutang tersebut. Tetapi apabila harga barang masih jauh untuk melunasi hutang, maka hutang harus tetap dibayar kekurangannya, dalam praktek di lapangan biasanya masih tidak cukup karena adanya sanksi yang didapat oleh pihak nasabah. Bila perjanjian kredit menggunakan hak jaminan dan tidak didaftarkan dan nasabah melakukan tindakan wanprestasi, maka pihak BCA akan mendaftarkan hak tanggungan. Pada pembahasan ini, sebenarnya pihak PT. BCA Finance Kota Malang sudah memberikan pelayanan yang sebaik baiknya ke nasabah. Hal ini dikembalikan ke nasabah dalam menggunakan kredit yang sudah dikasih oleh pihak PT. BCA Finance Kota Malang, kredit itu digunakan dengan baik atau digunakan dengan tidak baik. Pelayanan yang baik bisa dilihat dari ketika pihak nasabah mengalami kesusahan pihak BCA tetap akan menyelesaikannya dengan cara damai. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih guna mencapai suatu kesepakatan saat melakukan sesuatu hal-hal yang bersifat terikat. Semua perjanjian tentunya harus memiliki suatu kriteria persyaratan yang telah terdapat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berisikan (1) Terdapat kata sepakat dari kedua pihak yang mengikatkan diri, (2) Terdapat atau adanya suatu kecakapan hukum saat membuat perjanjian, (3) Memiliki objek atau hal tertentu di dalam perjanjian, (4) Sebab yang halal bisa ditimbulkan.

Perjanjian kredit terlahir oleh kedua pihak yang telah sepakat, di mana salah satu sudah memberi semua pinjaman yang bisa disebut Kreditur sedangkan debitur adalah memperoleh pinjaman dan harus mengembalikan semua pinjaman yang telah diperoleh, dan pinjaman itu harus dibayarkan secara tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan secara awal. Ketentuan pada kredit bisa mengacu ke Kitab Undang- Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat sah pada perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata: Terdapat kesepakatan antar kedua pihak adalah langkah yang sangat awal agar perjanjian bisa terwujud. Adanya

kesepakatan antar kedua pihak maka sudah menimbulkan pendapat yang sesuai antar debitur dan kreditur. Semua perjanjian kredit yang telah dilakukan pihak PT. BCA Finance ke nasabah sangat wajib memenuhi semua syarat-syarat sepakat antar PT. BCA Finance dengan para nasabah dari PT. BCA Finance dan harus disahkan melalui akta pada perjanjian yang harus di tanda tangani di hadapan notaris yang ikut pada perjanjian ini. Jika sudah terdapat kata sepakat antar kedua pihak harus memenuhi semua hak-hak dan kewajiban yang telah disepakati yaitu PT. BCA Finance memiliki kewajiban memberikan pinjaman kredit serta mendapatkan prestasi dari para nasabah, dan kemudian akan mendapatkan semua haknya yaitu kredit dari PT. BCA Finance dan harus membayar semua tagihan.

Terdapat kecakapan dari antar pihak guna membuat sebuah perjanjian pada saat pelaksanaan perjanjian, pihak PT. BCA Finance akan memberikan semua kriteria dan syarat-syarat khusus untuk bisa dinyatakan apakah cakap saat melakukan sebuah perjanjian, pihak PT. BCA Finance mengharuskan kepada semua calon nasabah apabila sudah menikah diharuskan membawa semua surat-surat nikah dan apabila para calon nasabah belum menikah harus menghadirkan orang tua atau wali sebagai syarat-syarat perjanjian. Bila semua syarat-syarat sudah terpenuhi maka semua calon nasabah dianggap sudah cakap guna melakukan sebuah perjanjian.

Terdapat hal tertentu Hal-hal tertentu bisa menyangkut sebuah perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua pihak, pihak PT. BCA Finance dan nasabah yaitu pada perjanjian kredit. Objek pada perjanjian harus sangat jelas, karena kewajiban dan hak pihak nasabah dan PT. BCA Finance akan jelas terdapat sebab tertentu dan Undang-Undang tidak melarang Pada perjanjian yang sudah dilakukan oleh PT. BCA Finance dan nasabah harus dilakukan sesuai dengan semua sebab yang halal, maksudnya pada perjanjian harus mengacu ke peraturan Undang- Undang dan tidak boleh terdapat perilaku menyimpang. Selain sudah mengacu pada ketentuan yang sudah diterapkan oleh Undang- Undang, perjanjian kredit bisa dilakukan dengan adanya kesepakatan antar kedua pihak yang tak boleh keluar atau melanggar dari semua ketentuan atau syarat yang sudah ada serta lebih menggunakan perjanjian baku dan standar. Pelaksanaan Perjanjian Kredit di PT. BCA Finance Kota Malang.

Perjanjian kredit yaitu adalah perjanjian yang bersifat pokok dan dilakukan oleh pihak PT. BCA Finance dan nasabah harus dilakukan secara tertulis dan nanti disahkan oleh notaris. Perjanjian kredit ini terdapat kata sepakat yang nanti akan ada akibat hukum serta perbuatan pada saat melakukan kewajiban dan hak. Pihak PT. BCA Finance mendapat

prestasi dari pihak nasabah dan pihak nasabah harus melakukan prestasi ke pihak PT. BCA Finance. Pada saat memberikan kredit ke nasabah, semua syarat harus memenuhi dan yang harus menyertakan jaminan sebagai bukti pemberian kredit. Kedua pihak akan mendapatkan semua manfaat dimana pihak nasabah diberi kredit dari pihak PT. BCA Finance dan pihak PT. BCA Finance akan mendapatkan semua manfaat terjaminnya perjanjian kredit dan wanprestasi akan terantisipasi. Ini nantinya akan membuat pihak Debitur memiliki kepercayaan yang sangat tinggi dan percaya semua tanggungan akan segera dilunasi oleh para nasabah.

Bila semua syarat berkas serta data sudah memenuhi, proses lanjutannya yaitu menyurvei objek yang akan dijadikan sebagai jaminan. Pada proses ini pihak PT. BCA Finance akan terjun ke lapangan untuk melihat layak atau tidak jaminan ini di gunakan sebagai jaminan. Selain survey jaminan yang akan menjadi objek, PT. BCA Finance juga akan melihat serta mengontrol semua aspek yang dirasa sangat penting saat memberikan kredit. Selain itu nasabah harus terdapat berbagai unsur ini penilaian dari segi watak atau character penilai karakter watak kepada calon nasabah atau debitur sangat bertujuan guna mengetahui jujur atau tidaknya dari pihak debitur saat melunasi hutang-hutang. Hal ini nantinya agar pihak pemberi pinjaman menjadi lebih mudah. Pihak PT. BCA Finance harus lebih teliti saat melihat dari setiap masing-masing karakter nasabah. Pada saat menjalankan survey, para petugas harus mencari info tentang calon- calon nasabah apakah mereka bisa dipercaya atau tidak ketika sudah diberi semua hak pinjaman.

Penilaian modal (*capital*) Pihak PT. BCA Finance harus terlebih dahulu menganalisa terhadap dana atau keuangan para calon nasabah secara keseluruhan tentang masa masa yang telah berlalu dan masa yang akan datang, maksud dari hal ini adalah guna mengetahui modal yang akan diberikan kepada pihak debitur Penilaian kemampuan (*capacity*) Pihak PT. BCA Finance harus meneliti dan menilai dari kemampuan para calon-calon nasabah dalam melihat sisi manajerial, sehingga nantinya pihak PT. BCA Finance memiliki rasa yakin yang lebih tinggi bahwa pembiayaannya suah kepada orang yang sesuai atau tepat. Pada hal sangat besar pengaruh kepada pengembalian pinjaman yang telah disalurkan. Pada penilaian dari segi kemampuan ini, surveyor diajarkan untuk menilai dan melihat tentang cakap atau tidaknya para calon-calon nasabah saat mengelola usaha mereka. Dari sinilah layak dan tidaknya pihak debitur menerima pinjaman atau tidak.

Penilaian prospek tentang terhadap agunan (*collector*) Penilaian ke agunan sangat besar pengaruhnya terhadap keberlangsungan pada suatu perjanjian. Fungsi dalam hal ini

fungsinya memberikan kredit, pihak debitur melakukan wanprestasi. Semua jaminan yang diberikan oleh pihak debitur harus semua jaminan yang cukup syaratnya dalam memberikan semua kredit, karena jaminan ini akhirnya menjadi objek bagi pelunasan semua hutang dari pihak debitur jika wanprestasi. Penilaian usaha nasabah terhadap prospek (*condition of economy*) Pihak PT. BCA Finance terlebih dahulu menganalisis keadaan di pasar luar atau dalam negeri, baik dari masa yang akan datang atau masa lalu yang sudah, hal ini nantinya bisa mengetahui diketahui oleh pihak PT. BCA Finance. Setelah survey selesai, maka pihak PT. BCA Finance akan memutuskan kepada calon nasabah apakah calon nasabah ini layak atau tidak mendapat semua pinjaman serta pihak PT. BCA Finance menentukan berapa besar pinjaman yang bisa nasabah ajukan. Apabila semua pelaksanaan survey sudah selesai dan calon nasabah bisa dinyatakan layak menerima pinjaman maka proses lanjutannya mengesahkan perjanjian yang dilakukan tanda tangan akta perjanjian di Notaris, tanda tangan ini bisa berlaku dengan jaminan yang telah terdaftar atau jaminan yang masih didaftarkan. Waktu pelaksanaan saat perjanjian harus terdapat jaminan sebagai ikatan dari pokok perjanjian yaitu di perjanjian kredit, bila mana pokok perjanjian sudah tidak lagi diperlukan atau terhapus karena lunasnya hutang-hutang, maka jaminan fidusia dan tanggungan hak jaminan fidusia juga akan terhapus dan jaminan dikembalikan kepada nasabah. Pada proses perjanjian kredit ini adalah proses yang sangat wajib dilakukan karena perjanjian kredit ini kredit yang sudah diperoleh oleh pihak nasabah akan sangat membantu guna memenuhi semua kebutuhan nasabah saat akan menjalankan usaha. Pihak PT. BCA Finance mendapatkan manfaat yang besar dengan memberikan kredit maka peredaran uang akan meningkat, bisa juga meningkatkan semua pendapatan dan selain itu hubungan kerja juga akan meningkat antara pihak PT. BCA Finance dengan nasabah. Maka dari itu harus ekstra hati-hati dalam melakukan perjanjian kredit.

Penerapan Hukum Jaminan pada Perjanjian Kredit di PT. BCA Finance Kota Malang Hukum Jaminan adalah aspek yang sangat penting pada perjanjian kredit, dengan terdapatnya jaminan, maka dalam perjanjian kredit yang dilakukan akan terdapat kepastian hukum dengan memiliki syarat bahwa yang sudah dijaminan telah didaftarkan. Perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan (*accessoir*), jaminan tambahan bisa ada karena perjanjian pokok (perjanjian kredit). Apabila perjanjian kredit tidak ada perjanjian jaminan tidak akan bisa dilakukan. Dengan maksud lain peran dari hukum jaminan berkedudukan hanya memiliki peran pengikat antar berbagai pihak yang sedang melakukan perjanjian kredit.

Apabila nasabah tidak bersikap kooperatif pihak BCA tetap memberikan jalan keluar dengan kolektibilitas dinaikkan yang semula macet hingga ke bermasalah hal ini bisa memberikan kemudahan ke nasabah agar bisa mencari jalan guna menyelesaikan. Selain hal tersebut, pihak BCA juga memberikan asuransi ke nasabah. Agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berjalan aman dan lancar, pihak leasing harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Polri. Pihak Polri telah mengeluarkan Peraturan Kapolri atau (Perkap) No. 8 Tahun 2011. Peraturan ini ditujukan agar pelaksanaan eksekusi jaminan terselenggara dengan tertib, aman, lancar dan bisa dipertanggung jawabkan nantinya. Berikut adalah peraturan yang telah ditetapkan Polri:

Pada Pasal 2 perkap telah dijelaskan bahwa tujuan dikeluarkannya aturan ini adalah:

- a. Agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berjalan secara tertib, aman, lancar dan bisa dipertanggung jawabkan.
- b. Agar penerima jaminan fidusia terlindungi keamanan serta keselamatannya dari perbuatan yang merugikan seperti keselamatan jiwa serta kerugian harta.

Dengan diterapkannya pasal 2 ini kedepannya agar tidak ada lagi kasus debt collector yang merugikan pihak debitur.

Pasal 3 peraturan menjelaskan semua prinsip peraturan yakni sebagai berikut:

- a. Legalitas, pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sudah harus sesuai pada ketentuan pada peraturan perundang-undangan.
- b. Nesesitas, pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus diberikan berdasar pada penilaian kondisi serta situasi yang dihadapi.
- c. Proporsionalitas, pengamanan eksekusi harus dilaksanakan dengan menghitung hakikat ancaman yang sedang dihadapi serta pelibatan kekuatan.
- d. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan saat pengamanan jaminan fidusia bisa dipertanggung jawabkan.

Keempat prinsip tersebut harus diterapkan pada pihak leasing agar tidak bertentangan dengan peraturan Polri.

Pada Pasal 6 persyaratan saat pengamanan yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya permintaan dari pihak pemohon.
- b. Terdapat akta jaminan fidusia.
- c. Jaminan fidusia sudah terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia.
- d. Adanya sertifikat jaminan fidusia.
- e. Jaminan fidusia harus berada pada wilayah Indonesia.

Pihak leasing harus mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan Polri dalam pengamanan objek jaminan fidusia agar pengamanan berjalan aman serta tertib. Sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2011 diharapkan nantinya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan sesuai prosedur hukum yang sudah berlaku agar kasus kekerasan yang dialami oleh pihak debitur tidak kembali terulang.

KESIMPULAN

1. Faktor penyebab konsumen wanprestasi di PT. *BCA Finance* Kota Malang dalam perjanjian *leasing*. Terdapat kegagalan pada usaha yang mengharuskan nasabah akhirnya tidak memiliki pemasukan dan itu berdampak pada pembayaran kredit yang sedang berlangsung. Hal ini menyebabkan akhirnya nasabah tidak bisa membayar kredit karena pendapatannya tidak masuk pada nasabah, Terdapat penyalahgunaan kredit yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tak sesuai dengan tujuan awal pada saat peminjaman yang awalnya agar lancar bidang keusahaan nasabah akan tetapi malah dipergunakan sebagai lainnya, terdapat keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) adalah nasabah tidak bisa membayar semua hutang-hutangnya karena mengalami musibah.
2. Penyelesaian wanprestasi pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor. Pihak leasing atau pihak kreditur melibatkan aparat kepolisian dalam menarik kendaraan bermotor agar kasus kasus yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh debt collector dalam menarik kendaraan dengan cara mengintimidasi serta kekerasan dan tak jarang juga ada yang menghilangkan nyawa serta membuat kerugian harta benda kepada pihak debitur tidak terulang kembali. Hal ini bila terjadi secara terus menerus akan sangat merugikan pihak debitur, maka dari itu telah diterbitkannya peraturan Polri No. 8 Tahun 2011 agar jalannya eksekusi jaminan fidusia berjalan lancar, tertib, aman dan bisa dipertanggung jawabkan nantinya. Diharapkan juga nantinya debt collector harus mematuhi peraturan-peraturan hukum yang telah berlaku dalam mengatasi permasalahan kredit macet dan tidak semena-mena melakukan tindakan kekerasan serta kerugian harta kepada debitur, karena kebanyakan saat ini debt collector tak mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku saat menarik kendaraan yang kreditnya macet.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Achmad, Cholid Narbuko, (2003), *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari

- Ade Arthesa, Edia Hendiman, (2006), *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia
- Aprilianti, (2011), *Perjanjian Sewa Guna Usaha Antara Lessee Dan Lessor, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, No. 3.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- M. Yahya Harahap, (1982), *Segi-segi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Alumni
- Ni Luh Ayu Regita Cahyani, I Nyoman Putu Budiarta, (2021), *Hukum Perlindungan Bagi Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi, Jurnal Prefensi Hukum*, Volume 2, Nomor 2
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tentang perusahaan leasing tidak bisa langsung menarik kendaraan jika debitur menunggak kredit.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, (2011), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia pers
- Sri Warjiyati, (2018), *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Suhrawardi k. Lubis dan farid wajdi, (2001), *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Suratman, Phillip Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alphabeth
- Zaeni Asyhadie, (2005), *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada